

PENYULUH AGAMA DAN PENGELOLAAN KERUKUNAN DI MANADO

Muh. Irfan Syuhudi

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72, Makassar
Email: irfansyuhudi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini ingin mengetahui peran penyuluh agama di dalam menangani dan mengelola kerukunan antarumat beragama di Manado. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penulisan secara deskriptif. Informan penelitian ini adalah penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan, Kota Manado selama ini diidentikkan dengan masyarakat toleran dan rukun. Meski begitu, kota ini pun beberapa kali diterpa isu yang bisa mengancam kehidupan antarumat beragama, terutama pasca kerusuhan di Ambon dan Poso, awal tahun 2000-an. Dalam kaitan ini, penyuluh agama belum terlibat langsung di dalam menangani dan mengelola kerukunan antarumat beragama. Tugas tersebut lebih banyak dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun, penyuluh agama tetap berkontribusi terhadap pencegahan konflik, terutama saat melakukan ceramah kepenyuluhan kepada masyarakat binaannya tentang kerukunan, toleransi, dan multikultural.

Kata kunci: Kerukunan antarumat beragama, penyuluh agama, konflik, Manado

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, dunia menjadi seolah semakin mengecil, dan terhubung satu sama lain. Globalisasi bahkan menyebabkan batas-batas politik, budaya, ekonomis, yang tadinya ada, sekarang menjadi semakin rapuh, mengabur, dan dianggap kurang relevan. Globalisasi menyebabkan dunia semakin mudah terhubung satu sama lain, atau diistilahkan kesalingterhubungan (*interconnectedness*) (Putranto, 2005:253). Globalisasi, menurut Stehr (2001), sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi kaum atau entitas yang mapan (negara bangsa dengan teritorinya, lembaga hukum dan peradilan, dan agama), namun merupakan peluang bagi kelompok-kelompok kecil, pergerakan sosial, dan para

pemain di bidang informasi dan teknologi, serta bisnis (Putranto, 2005:232).

Dampak dari globalisasi tersebut, tentunya, adalah ikut berubahnya sebagian perilaku masyarakat. Ada yang terlena dan kemudian ikut arus atas nama modernitas, dan ada juga yang tetap mempertahankan identitas mereka seperti dulu kala. Dengan demikian, globalisasi juga bisa mempengaruhi individu atau kelompok masyarakat dalam memahami agama mereka. Tindakan kekerasan atas nama agama maupun etnis, merupakan salah satu dampak dari derasnya arus globalisasi ke suatu daerah tertentu.

Salah satu tugas meredam atau sebagai benteng terhadap derasnya arus globalisasi, terutama dikaitkan dengan kerukunan

antarumat beragama adalah penyuluh agama di bawah naungan kementerian agama. Sebab, penyuluh agama adalah ujung tombak yang berperan penting dalam upaya membimbing masyarakat memahami ajaran agama, dan mengamalkannya secara berkualitas, sehingga tidak menyalahi penafsiran terhadap ajaran agamanya.

Penyuluh agama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 tahun 1999 dan Nomor: 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, menyebutkan, Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh agama merupakan juru penerang yang menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik, mewujudkan kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai, serta memiliki wawasan multikultur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu dengan yang lain (<https://ngariungbabarengan.wordpress.com/penyuluhan/pengertian-dan-hakikat-penyuluh-agama/>, diakses 14 Desember 2015).

Dalam konteks internal Kementerian Agama, kehadiran penyuluh agama sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan umat beragama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat beragama di Indonesia sesuai visi besar Kementerian Agama. Arah kebijakan dan strategi nasional bidang agama tahun 2015-2019 pada poin a1 dan poin b tentang peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama dan meningkatkan kerukunan umat

beragama. Tujuan Bimbingan dan Penyuluhan Agama; Menciptakan pribadi dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, toleran dan hidup rukun, berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Peran-peran penyuluh Kementerian Agama dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama meski peran tersebut tidak masuk dalam regulasi tugas dan fungsi penyuluh agama. Namun, jika menilik pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang multikultur dan pentingnya pembinaan kerukunan umat beragama sebagai tugas besar Kementerian Agama dalam menjaga keutuhan NKRI, peran penyuluh agama dalam hal ini tidak bisa diabaikan.

Secara formalistik, penyuluh agama di Manado terlihat belum bekerja secara maksimal mengelola kerukunan antarumat beragama. Mereka belum diberi ruang untuk mengekspresikan salah satu tugas dan fungsinya sebagai pembinaan umat beragama demi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat, serta pembinaan kerukunan antarumat beragama. Keberadaan penyuluh dianggap masih kalah pamor dengan lembaga adat, seperti FKUB dan BKSAUA dalam penanganan konflik. Meski begitu, secara kultural, penyuluh tetap melaksanakan perannya sebagai “petugas kebakaran”. Mereka merasa bertanggung jawab terhadap terciptanya kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Artinya, mereka pun ikut memadamkan “kobaran” emosi masyarakat untuk tidak terprovokasi bila terjadi konflik di daerahnya.

Balai Litbang Agama Makassar telah melakukan penelitian terkait kepenyuluhan. Penelitian pertama dilakukan pada 2009 mengenai “Dakwah Islam di Daerah Terpencil”, kemudian “Penyelenggaraan Pelayanan Kepenyuluhan Agama” tahun 2010, dan selanjutnya tentang “Pembinaan

Muallaf di Kawasan Timur Indonesia” pada 2012. Penelitian tersebut menemukan, model-model pembinaan yang diberikan masih cenderung bersifat konvensional dan dengan muatan materi yang bersifat normatif dan eskatologis. Pembinaan umat berkenaan dengan bagaimana membangun relasi sosial yang harmonis dalam bingkai masyarakat multikultural dan multiagama masih kurang dieksplorasi.

Tulisan ini ingin mendeskripsikan peran penyuluh agama terhadap peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Manado, dengan melihat situasi hubungan umat beragama di kota ini, pandangan penyuluh agama tentang kerukunan, serta keterlibatan penyuluh agama dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama.

TINJAUAN TEORITIS

Penyuluh Agama

Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya pada pasal 1 menyebutkan: “Penyuluhan Agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.” Menurut M. Arifin, yang dimaksud dengan penyuluhan agama adalah: “Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor: 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama adalah: “Pegawai Negeri

Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.”

Selanjutnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Dalam SKB tersebut, Penyuluh Agama adalah: “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.”

Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000) dalam pasal 1 disebutkan: “Penyuluh Agama adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.” Pada praktiknya di lapangan, penyuluh agama bukan hanya mereka yang berstatus sebagai PNS, melainkan juga tokoh-tokoh agama yang diberikan SK oleh Kementerian Agama setempat sebagai penyuluh agama non PNS.

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Salah satu tugas pokok Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan terhadap umat beragama agar menjadi harmonis dan toleran, serta komitmen pada keutuhan NKRI. Untuk itu, pembinaan kerukunan umat beragama oleh kemenag dapat dirumuskan dalam lima langkah

strategis. *Pertama*, Menumbuhkan dan mengembangkan situasi yang kondusif bagi terwujudnya kerukunan umat beragama (baik inter, antar, maupun umat beragama dengan pemerintah). *Kedua*, Pembinaan kerukunan umat beragama agar lebih harmonis dan lebih toleran melalui penguatan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan agama yang bervisi rahmat, damai, atau kasih. *Ketiga*, Mencegah agar tidak terjadi pertentangan maupun konflik atas nama agama termasuk di antaranya melakukan pencegahan terhadap upaya untuk membenturkan umat beragama dengan pemerintah. *Keempat*, Menjadi mediatir apabila terjadi pertentangan atau konflik yang membawa atau mengatasnamakan agama. *Kelima*, Menabur dan menyebarkan wawasan multikulturalisme dan paradigma keberagamaan yang inklusif yang sejalan dengan prinsip “Bhineka Tunggal Ika.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemanfaatan dokumen di Kantor Kemenag Manado, BPS Kota Manado, dan penelusuran internet. Penentuan informan secara sengaja (*purposive*), yaitu penyuluh agama PNS dan honorer (non PNS), pejabat terkait di lingkungan Kemenag Manado, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat binaan penyuluh agama (Moleong, 2010:174-202 dan Endraswara, 2006a:213-214). Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen. Setelah itu mereduksi data, memaparkan data, dan simpulan melalui pelukisan dan verifikasi (Endraswara, 2006:176).

PEMBAHASAN

Mengamati Kerukunan Antarumat Beragama di Manado

“Di Manado tidak enak membahas kerukunan. Soalnya, di sini aman-aman saja.”

Begitu jawaban yang sering terlontar dari beberapa orang, ketika saya menanyakan perihal kondisi kerukunan antarumat beragama di kota ini. *Ya*, Manado boleh berbangga. Ia adalah salah satu kota di Indonesia yang sering dijadikan sebuah percontohan tentang potret kerukunan antarpemeluk agama. Sejak dulu, Manado yang diidentikkan sebagai “daerah Nasrani”, acap kali menjadi rujukan ikon mengenai kerukunan antarumat beragama. Walaupun pernah pula terjadi gesekan-gesekan, namun secara historis, kota ini masih dianggap cukup aman dari segala macam konflik berbau agama maupun etnis hingga kini.

Penduduk di Kota Manado berdasarkan BPS 2014 berjumlah 419.596 jiwa. Beberapa literatur (yang ditulis oleh peneliti lokal dan peneliti luar) sering mengasosiasikan Manado sebagai “daerah Nasrani”. Para penulis tersebut mengacu kepada jumlah pemeluk agama di Manado yang kebanyakan beragama Kristen, yakni 289.000 jiwa (68%), sedangkan pemeluk Islam sendiri menempati urutan kedua, dengan jumlah penduduk 175.569 jiwa (41%).

Secara akademis, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, menjelaskan, orang-orang di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), termasuk di Kota Manado, memang senang hidup rukun dan damai. Dalam sebuah risetnya terkait indeks kerukunan umat beragama di Manado pada 2011, lembaga yang bermarkas di Jalan Andi Pettarani Makassar ini, menemukan, kerukunan umat beragama di Kota Manado masuk kategori sangat baik, yaitu 0,75 persen.

Ketika konflik di Ambon, Poso, dan Kalimantan Timur meletus, banyak pihak yang menduga konflik tersebut akan merembes pula ke Manado. Apalagi, Manado sering dijadikan sasaran eksodus pengungsi konflik. Secara geografis, tidak terlalu sulit untuk sampai ke Manado. Perjalanan bisa ditempuh melalui udara maupun laut. Memang, ketika konflik masih panas-panasnya, banyak orang yang berasal dari daerah konflik (terutama Ambon dan Poso) mengungsi ke Manado untuk menyelamatkan diri. Di antara pengungsi itu, ada juga yang mencoba mencari bala bantuan untuk diajak ke Ambon maupun Poso. Yang parah, oknum pengungsi ini ada juga yang berupaya memprovokatori dengan membawa suasana konflik di Ambon dan Poso ke Manado.

Beruntung, orang Islam dan Nasrani di Manado tidak terpengaruh dengan hasutan provokator tersebut. Umat Islam dan Kristen berusaha sekuat tenaga menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Manado. Penyelenggara Katolik Kemenag Kota Manado, Yean M.V. Rasu, menyatakan, orang Manado menerima dengan tangan terbuka pengungsi dari Ambon dan Poso ke daerah yang dijuluki *Nyiur Melambai* ini. Akan tetapi, ketika terdengar mulai bermunculan oknum-oknum yang diduga ingin memecah-belah umat beragama di Manado, orang muslim dan non muslim kemudian melakukan perlawanan. Apabila ketahuan terbukti sebagai provokator, mereka sepakat akan mengusir dari Tanah Manado.

Bagi orang Manado, kerukunan antarumat beragama bukan untuk dipamerkan, seperti yang sering terlihat pada acara seremonial (perayaan hari-hari besar keagamaan). Kerukunan itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, sekali lagi, motto yang dipopulerkan Dr. Sam Ratulangi *Si Tou Timou Tumou Tou*

(Manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain atau Orang hidup untuk menghidupkan orang lain) telah melekat kuat pada diri mereka. Semua manusia di muka bumi ini harus dihargai dan dihormati. Karena itulah sebenarnya inti kerukunan dan perdamaian.

Dalam hubungan beragama, masyarakat di Manado cenderung toleran. Masyarakat pada umumnya menerima dengan tangan terbuka ideologi yang berbeda dengan mereka. Beberapa organisasi trans-nasional, seperti Ahmadiyah, Jamaah Tabligh, dan Syiah, terdapat di Manado. Mereka pun selama ini merasa tenang menjalankan aktivitas ritualnya di tengah masyarakat. “Masyarakat di Manado tidak ada pusingnya. Masyarakat berpandangan, silakan jalan sendiri dan silakan menjalankan aktivitasnya asalkan tidak mengganggu ketenangan dan ketentraman kampung,” kata Penyelenggara Syariah Kemenag Kota Manado, Mas’udah Hafid, di ruang kerjanya, 30 September 2015.

Mencermati Potensi Konflik; Agama dan Pilkada Agama

Ketika saya turun lapangan (September – Oktober 2015), relasi sosial sebagian umat Islam dan umat Kristen (termasuk Katolik) sempat menegang. Hal ini berlangsung hampir setahun, terutama di kalangan masyarakat awam (bukan pejabat dan politisi). Masing-masing orang Islam maupun Kristen (dan Katolik) menganggap paling benar. Pemicunya adalah renovasi “masjid tua”, Masjid Al-Khairiyah, di kawasan Pasar 45. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1960-an, dan merupakan tanah milik pemerintah kota. Orang Islam dan Nasrani terlibat selisih pendapat terkait renovasi masjid tersebut, sehingga Kapolda Sulawesi Utara turun tangan untuk menenangkan perwakilan kedua belah pihak (Islam dan Kristen) (dalam *Rakor Bersama Polda, Sepakat Pembangunan di*

Lahan Eks Kampung Texas Dipending, dalam <http://manadoline.com/icon-torang-samua-basudara-segera-hadir-di-manado/>, diakses 6 Oktober 2015). Berhubung belum ada titik temu, renovasi masjid dan pembangunan Gedung Graha Religi untuk sementara dihentikan.

Rencana renovasi masjid pertama kali mengemuka ketika Jimmy Rimba Rogi menjabat Walikota Manado (2005-2008). Saat itu, di sekitaran masjid banyak rumah penduduk, yang membangun rumahnya di atas tanah negara. Perkampungan di sekitar masjid ini dikenal dengan “Perkampungan Texas”. Disebut demikian, lantaran sebagian penduduk yang mendiami perkampungan tersebut sering terlibat kasus kriminal, seperti mencuri, merampok, hingga membunuh. Beberapa warganya malah ada yang sering keluar-masuk penjara akibat kasus kriminal (Wawancara, beberapa informan di Manado, 1 Juni 2015).

Jimmy, yang di masa jabatannya dijebloskan ke penjara gara-gara tersangkut kasus korupsi, merelokasi penduduk di sekitar masjid sekitar tahun 2007. Mereka dipindahkan di Kampung Mahoni, masih di seputaran Kota Manado. Meski ada warga yang protes untuk direlokasi, mereka akhirnya mengikuti keinginan pemerintah. Apalagi, pemerintah tetap memperhatikan tempat tinggal penduduk di Perkampungan Texas.

Ketegangan mulai muncul ketika akan didirikan gedung Graha Religi yang berdekatan dengan Masjid Al-Khairiyah. Sebagai ikon kerukunan, Manado ingin menyandingkan semua rumah ibadat dalam satu lokasi. Namanya pun sudah ditetapkan; Gedung Graha Religi. Tetapi, rumah ibadat itu nantinya hanyalah simbol, dan tidak diperuntukkan buat sembahyang. Dan, lokasi yang dipilih adalah di bekas perkampungan

Texas, di dekat Masjid Al-Khairiyah. Peletakan batu pertama pembangunan gedung Graha Religi dilakukan Walikota Manado, Vicky Lumentut pada 8 Juni 2015.

Keberadaan gedung Graha Religi yang berdampingan dengan Masjid Al-Khairiyah, seolah ingin memberikan gambaran tentang indahnya kebersamaan di Manado. Graha Religi adalah gabungan dari enam rumah ibadat di Indonesia. Rumah ibadat ini tidak digunakan untuk beribadat. Ia cuma simbol, yang mencerminkan sebuah kerukunan dan toleransi. Ia diasosiasikan simbol kerukunan di Manado. Ia semacam miniatur rumah ibadat. Graha Religi bertujuan untuk mewujudkan kepedulian dan menjaga keharmonisan, serta kerukunan antarumat beragama di Manado. Yang membedakan, keberadaan Masjid Al-Khairiyah di situ bukanlah simbol, seperti halnya rumah ibadat agama lain yang rencana dibangun. Masjid ini punya jamaah, dan selalu digunakan sembahyang fardhu, termasuk shalat Jumat.

Sebelum ide tersebut terealisasi, riak-riak protes mulai bermunculan sampai penelitian ini tuntas. Orang Islam dan Kristen (juga Katolik) sama-sama protes. Di kalangan Islam, terutama pengurus Masjid Al-Khairiyah, mereka tidak setuju masjid berdampingan atau satu pekarangan dengan rumah ibadat agama lain. Apalagi, ada wacana, bahwa gedung ini akan dibangun empat lantai, dan di tiap-tiap lantainya terdapat rumah ibadat. Protes dari pihak non muslim adalah, masjid ini awalnya hanya akan direnovasi. Tetapi mengapa, lambat laun, lahannya justru diperlebar, sehingga menyebabkan lahan di sekitarnya (yang akan dibangun rumah ibadat agama lain dalam bentuk mini), menjadi sempit. Malah, menurut informasi, sebagian tanah yang rencananya ditempati oleh rumah ibadat agama lain itu, ternyata milik seorang

pengusaha lokal. Ia bukan tanah negara, seperti halnya tanah di atas masjid. Alhasil, kalau tetap dipaksakan dibangun gedung Graha Religi, bisa-bisa bakal menimbulkan konflik dengan pemilik lahan.

Non muslim sebenarnya tidak mempersoalkan renovasi dan keberadaan masjid tersebut. Terlebih, masjid ini punya nilai histori, lantaran berusia hampir 60. Mereka cuma protes, karena masjid ini mengambil lahan lain yang dianggap bukan miliknya. Sehingga, lahan-lahan lain, yang seharusnya diperuntukkan buat pendirian rumah ibadat agama lain (meskipun berupa simbol), menjadi semakin sempit dan tidak memungkinkan lagi. Hal inilah yang kemudian memantik protes orang non muslim (kebanyakan Kristen). Terhitung, menjelang Ramadhan 2015, sebanyak tiga kali orang-orang non muslim, termasuk aliansi Makapetor (Masyarakat Kawanua Peduli Toleransi) menggelar aksi unjuk rasa di depan masjid. Unjuk rasa berlangsung damai. Tidak terjadi bentrokan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Saat penelitian berlangsung, wacana untuk memilih calon pemimpin dari agama tertentu (umumnya Islam dan Nasrani) ramai diperbincangkan di jejaring media sosial (*facebook* dan *twitter*). Pada Desember 2015 ini, Kota Manado dan Sulut akan memilih walikota dan gubernur. Demikian pula beberapa kabupaten dan kota. Kebanyakan dari tim suksesi maupun partisipan mulai melakukan perang wacana. Mereka saling mengklaim, dengan menyatakan, bahwa pemimpin dari agama-nyalah yang layak memimpin, sementara agama lain dinilai belum pantas. Untuk menguatkan argumentasi tersebut, tak jarang pula mereka baku serang di media sosial, dengan sengaja menjelek-jelekkan bakal calon saingannya.

Pada 2013, sentimen agama terkait politik sempat pula merambah ke Kota Bitung (salah satu kota di Sulut). Saat itu, salah seorang kader ormas Islam, Front Pembela Islam (FPI), meminta umat Islam di Bitung untuk tidak memilih pemimpin non muslim. Aksi penolakan itu disertai pula dengan membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat di jalanan. Aksi ini tentu saja meresahkan masyarakat setempat dan mengundang kemarahan, terutama dari pemeluk agama tertentu. Tindakan orang FPI itu dianggap provokator yang bisa menimbulkan ketegangan antarumat beragama (Wawancara beberapa informan di Manado, 9 Oktober 2015).

Dalam pentas politik lokal, penganut Islam dan Kristen belakangan ini mulai bersaing untuk meraup suara terbanyak. Mereka juga punya bakal calon yang berasal dari Islam. Untuk pilkada di Manado Desember 2015, dari lima kontestan, hanya satu orang bakal calon yang beragama Islam. Itupun jatahnya “cuma” wakil walikota. Sedangkan semua bakal calon walikota untuk periode 2015-2020 beragama Kristen. Sebagai kelompok minoritas, Islam sering kalah bersaing memperebutkan suara terbanyak. Namun, istilah mayoritas dan minoritas dalam sosiologi tidak selalu mengacu dari segi jumlah (*not fefer to a numerical majority*), tetapi merujuk pada sebuah kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu atau yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Di Afrika Selatan, misalnya. Penduduk di sana dihuni mayoritas orang berkulit hitam, namun politik dan kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh minoritas kulit putih (Liliwari, 2005:103). Ini menunjukkan, minoritas tidak selamanya menempati posisi inferior dalam politik dan kekuasaan. Ia bisa juga mengalahkan mayoritas.

Wacana keagamaan begitu menjanjikan untuk menarik simpati bagi politisi. Ia dianggap seksi dan diyakini mampu meraup dukungan kalangan tertentu. Tinggal memilih, mengolah, dan kemudian memainkan wacana tersebut. Persoalan kerukunan antarumat beragama, toleransi, hidup damai dengan penganut agama berbeda, merupakan salah satu jualan yang disenangi masyarakat awam, termasuk politisi lokal di Manado.

Pandangan Penyuluh Agama terkait Kerukunan

Penyuluh PNS dan Honorer

Status penyuluh agama di Kemenag Kota Manado terbagi dua, yaitu PNS dan honorer. Penyuluh PNS berjumlah 14 orang, yakni penyuluh Islam, 7 orang, penyuluh Kristen (5 orang), penyuluh Katolik (1 orang), dan penyuluh Buddha, 1 orang (Kemenag Kota Manado, 2015). Jika mengacu kepada jumlah pemeluk agama di Manado, jumlah penyuluh PNS Kristen seharusnya lebih banyak ketimbang penyuluh Islam, karena (penyuluh Kristen) lebih banyak melayani dan membina umat. Ini pula yang sering dibahas di lingkungan internal Kristen di kemenag kota. Kasi Bimas Kristen sebenarnya sering mempertanyakan, atau minimal mengusulkan untuk dibuka lagi perekrutan formasi tenaga penyuluh PNS kepada kepala kanwil kemenag Sulut, pejabat kemenag Jakarta yang berkunjung ke Manado, hingga kepala kemenag kota Manado. Hanya saja, sampai saat ini, ia belum menerima jawaban memuaskan.

Secara politis, jumlah penyuluh PNS Kristen di lingkungan kemenag kota, dianggap merugikan umatnya. Mereka kesulitan membagi waktu untuk melayani dan membina seluruh umat. Yang aneh, penyuluh PNS Islam, yang nyata-nyata jumlahnya

sedikit dibanding Kristen, justru diberi jatah lebih banyak dari Kristen. Meski masalah ini terkesan sepele, namun persoalan jumlah penyuluh agama ini kadang menimbulkan kecemburuan kalangan Kristen.

Untuk meredakan kekecewaan orang Kristen, kemenag kota kemudian merekrut tenaga penyuluh honorer di Manado. Dan, untuk penyuluh honorer Kristen diberi “armada” tambahan penyuluh sebanyak 718 orang. Secara keseluruhan, penyuluh honorer berjumlah 995 orang, yang terdiri atas penyuluh honorer Kristen 718 orang, Islam (217 orang), Katolik (30 orang), dan Buddha, 30 orang.

Pengangkatan penyuluh honorer sebenarnya atas permintaan kemenag, yang melihat masih terdapat kekurangan dalam melayani umat beragama di 11 kecamatan, lantaran penyuluh PNS belum mampu melayani dan membina seluruh umat. Karena itu, untuk bisa melayani dan membina seluruh umat, sekaligus meringankan tugas penyuluh PNS, kemenag kemudian merekrut tenaga penyuluh honorer. Secara kasar, hitung-hitungan perekrutan jumlah penyuluh didasarkan atas jumlah agama. Alhasil, karena umat Kristen secara statistik paling banyak, mereka pun merekrut tenaga honorer paling banyak, yaitu 718 orang, sedangkan Islam merekrut 217 orang, serta Katolik dan Buddha masing-masing, 30 orang.

Kriteria untuk penyuluh honorer adalah tokoh agama (ustadz/dai, pendeta, gembala, rohaniawan, guru Sekolah Minggu). Sebagai tokoh agama, mereka dianggap memiliki umat, dan setidaknya, apa yang mereka sampaikan akan didengarkan dan dipatuhi oleh umatnya. Proses perekrutan penyuluh honorer tidak berlangsung lama. Penyelenggara pada setiap kesempatan mengumumkan akan ada penerimaan penyuluh honorer di gereja, majelis taklim, pengajian, masjid, rumah

ibadah, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Penyelenggara sejauh ini punya relasi yang baik dan akrab dengan umatnya. Mereka juga sering menghadiri acara-acara yang diadakan oleh umatnya, baik yang sifatnya individual maupun kelompok. Dengan begitu, setiap penyuluh sudah mengenal, memahami, dan memiliki data mengenai tokoh agama di kota ini.

Penyuluh honorer yang direkrut kebanyakan berusia di atas 30. Untuk menghindari adanya tuntutan macam-macam dari penyuluh honorer, termasuk yang paling sering meminta diangkat jadi PNS, kemenag meminta mereka menandatangani perjanjian di atas kertas bermateri, yang salah satu poinnya, tidak menuntut diangkat menjadi pegawai negeri.

Kerukunan yang Simbolik?

Sejauh ini, tak ada yang membantah Manado adalah kota yang aman, damai, dan tenang. Ia jauh dari kesan sebuah kota yang rewel, yang sebentar-sebentar rusuh, bergejolak, dan kemudian meletus konflik. Dalam catatan sejarah, hampir belum pernah terjadi konflik berdarah-darah yang diakibatkan oleh agama maupun etnis di Manado. Padahal, masyarakat di kota ini heterogen dari segi agama dan etnis.

Yang sering terdengar adalah keributan atau perkelahian antarkampung. Perkelahian ini, biasanya, dipicu oleh ulah sekelompok anak muda, yang setelah minum minuman keras dan mabuk, lalu berbuat keonaran di sana-sini. Untuk menolak para pemabuk jalanan, seluruh elemen masyarakat bekerja sama dengan pemerintah setempat, dan tokoh agama, memberikan perlawanan secara simbolik dengan membuat slogan “*Brenti jo bagate*” (berhenti minum/mabuk). Hampir seluruh tembok di lorong atau pintu gerbang perumahan penduduk ditulisi slogan itu

menggunakan cat. Polisi pun tak segan-segan mengangkut dan menahan setiap orang yang yang kedapatan minum-minum di tempat umum. Lambat-laun, orang-orang di Manado mulai membiasakan diri untuk mengurangi dan bahkan berhenti minum, atau tidak terang-terangan minum di tempat umum.

Memasuki enam bulan terakhir (sejak Maret 2015), orang di Manado dibuat resah oleh perang kelompok dengan menggunakan panah *wayer*/baling-baling (busur). Perang kelompok ini telah menelan korban (meninggal dan luka-luka) akibat terkena panah *wayer* dari kedua belah pihak. Yang dikhawatirkan, apabila ada masyarakat umum, yang tidak tahu apa-apa, terkena “benda” melayang itu. Karena itu, polisi sudah bekerja keras dan mengamankan orang-orang yang berperang. Media lokal juga selalu memuat setiap kali pelaku tertangkap dan memuat fotonya. Meski begitu, perang kelompok ini dianggap kasus kriminal, yang tidak menjurus kepada kerukunan umat beragama.

Dalam konteks kerukunan, Manado menjadi idaman sebagian orang. Ia telah mendapatkan pencitraan dari dunia luar yang begitu indah. Manado telah mendapat apresiasi sebagai ikon kerukunan di Indonesia. Jadi, tak perlu heran apabila Manado seringkali mendapat kunjungan pejabat daerah dan pejabat publik dari daerah lain, yang ingin menimba pelajaran dari pejabat setempat mengenai bagaimana mengelola serta merawat kerukunan dan toleransi.

Bila melihat kasus-kasus di atas, Manado sebenarnya rawan terjadi perseteruan yang berujung kepada lahirnya konflik. Ketegangan-ketegangan yang sering terjadi di antara umat Islam dan Kristen bisa saja melahirkan bom waktu yang bisa meledak kapan. Pluralisme di Manado sesungguhnya

bisa dipandang dengan beberapa perspektif. Ia bisa saja dilihat sebagai modal dan kekayaan, yang sepenuhnya bisa membangun sebuah kerukunan dan toleransi yang kokoh. Namun, bagi komunitas lokal, kondisi tersebut justru bisa dipandang sebagai ancaman serius bagi sistem, struktur, nilai-nilai, serta kebiasaan hidup ideal yang telah ada (Bless, 65:2009). Yang diwaspadai apabila kerukunan antarumat beragama hanya tampak indah di bagian permukaan. Dengan begitu, ia cukup rapuh pada bagian bawah, bagian yang terkadang luput dari pengamatan. Yang tersembunyi inilah tidak boleh diremehkan. Ia, sewaktu-waktu, bisa menumpuk dan kemudian meledak. Ibarat bom waktu, alarmnya sudah disetel, tinggal menunggu waktu untuk meledak.

Sebagian orang Manado berpandangan, kehadiran orang-orang luar (pendatang) mengancam eksistensi mereka. Secara ekonomi, para pendatang mulai menyingkirkan beberapa orang Manado. Adanya sentimen penduduk lokal terhadap kesuksesan pendatang juga bisa menimbulkan potensi konflik. Ini memang belum kelihatan di permukaan. Meski begitu, sudah ada gejala ketidaksenangan orang lokal terhadap etnis pendatang. Seorang informan, mengungkapkan, beberapa orang Minahasa mulai melakukan boikot terhadap pedagang luar. Misalkan, melarang membeli makanan di warung milik orang Jawa atau etnis lain. Hal ini apabila tidak segera diredam dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang massif, dan ujung-ujungnya ada upaya bagi etnis lokal untuk membeli barang jualan dari etnis pendatang.

Apabila mengamati kerukunan antarumat beragama di Manado, hal itu terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh kesadaran masyarakat. Dalam konteks relasi sosial, tidak ada kendala yang tampak di permukaan. Semua umat beragama seolah

tidak berjarak. Bahkan, sudah banyak orang yang berdarah campuran (ibu Minahasa, ayah Bugis, dan sebagainya). Segregasi pemukiman yang dulunya berdasarkan agama dan etnis, kini mencair. Telah banyak ditemui beragam etnis dan agama yang berdomisili di Perkampungan Arab, Perkampungan Ternate, Perkampungan Bugis, dan Perkampungan Tionghoa.

Yang patut diacungi jempol adalah peran lembaga pemerintah dan lembaga kultural dalam meredam setiap kali terjadi pergolakan di masyarakat. Pemerintah selalu menanggapi serius dan bergerak cepat menyikapi setiap ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Demikian pula, lembaga sosial dan kultural seperti, antara lain, FKUB, BKSAUA, Brigadi Manguni Indonesia (BMI), selalu memberikan perhatian terhadap potensi konflik di daerah ini. Kearifan lokal dan tradisi lokal, seperti *Sitou Timou Tumou Tou*, *Torang Samua Basudara*, dan *Mapalus* (kerjasama) juga telah dipraktikkan oleh masyarakat. Nilai-nilai budaya serta kearifan lokal berfungsi sebagai peredam konflik. Di sini berlaku relativisme budaya, yakni para pendatang ikut mempraktikkan nilai-nilai lokal dan tradisi lokal, serta tidak menganggap budaya mereka yang paling baik, sehingga saling menghargai dan menghormati di antara etnis yang berbeda.

Meski begitu, dalam kasus tertentu, terutama menyangkut agama, masih ada yang belum bisa kompromi. Kasus Masjid Al-Khairiyah, misalkan. Kendati persoalan ini dianggap selesai, karena keterlibatan pemerintah, kepolisian, dan lembaga kultural medio Juni 2015. Namun, kasus ini dianggap belum tuntas, terutama pihak Kristen yang merasa paling dirugikan. Masih sering terdengar suara-suara miring dari kelompok agama non muslim yang menyatakan

kekecewaannya dengan pemerintah dan umat Islam. Orang-orang ini tidak berani menyuarakan aspirasinya kepada publik, karena menganggap keputusan tersebut sudah final. Mereka hanya berani menumpahkan kekecewaan di belakang layar, seperti diskusi internal di kalangan mereka, dan menulis status di media sosial. Orang-orang ini merasa sakit hati, dan menuding pemerintah berat sebelah. Pemerintah (walikota) dianggap memihak kepada umat Islam demi kepentingan pilkada. Ada dugaan, antara pemerintah dan sebagian umat Islam telah “menandatangani” kesepakatan tak tertulis yang menguntungkan kedua belah pihak. Buktinya, pemerintah tidak melarang pengurus masjid memperluas lahan, yang menyebabkan lahan yang diperuntukkan buat pembangunan rumah ibadat (mini) agama lain menjadi sempit.

Dengan melihat berbagai problematik laten tersebut, kerukunan di Manado boleh dikatakan masih sebatas kerukunan simbolik, atau kerukunan yang bersifat pasif. Kerukunan di Manado merupakan kerukunan bernuansa politis. Ia sering dijadikan jualan para politisi lokal untuk mencuri hati para konstituen menjelang pilkada. Belum ada kesadaran sepenuhnya dari semua masyarakat untuk hidup rukun. Masyarakat rukun bukan atas kesadaran pribadi, melainkan ada yang merukunkan. Mereka dipaksa rukun, karena takut atas konsekwensi apabila berbuat keonaran dengan umat dari agama lain.

Penyuluh dalam Konteks Kerukunan: Belum Dilibatkan Menangani Konflik

Tugas penyuluh agama terbagi atas dua, yaitu formalistik (tekstual) dan empiris (kontekstual). Formalistik di sini adalah, menjalankan program kerja berdasar atas tugas dan fungsi (tusi), yaitu penyuluh menerima program kerja dari pusat, lalu

menyesuaikan program kerja itu berdasarkan kondisi di lapangan. Setelah semua dianggap beres, mereka tinggal mengisi program tersebut sesuai format. Namun, sebelum memberikan materi, mereka terlebih dulu melihat dan memahami latarbelakang masyarakat bersangkutan. Penyuluh Islam, Muslihah Masteman, menyatakan, materi yang diberikan biasanya bersifat kondisional. Artinya, ia menanyakan kepada ibu-ibu majelis taklim materi apa yang mereka inginkan. Karena itu, setiap kali akan memberikan materi kepada majelis taklim, metode yang dilakukan sering berbeda. Terkadang dalam bentuk berdiskusi (tanya jawab), ceramah, atau langsung kepada praktik (misalkan mengaji, shalat, memandikan jenazah), dan sebagainya.

Semua penyuluh agama di Kemenag Manado mengaku belum pernah terlibat atau dilibatkan menangani konflik yang melibatkan agama maupun etnis. Mereka belum pernah diundang dalam rapat atau pertemuan formal yang menghadirkan pemerintah, BKSAUA, FKUB, tokoh agama, polisi, setiap kali terjadi ketegangan dan perseteruan yang mengatasnamakan agama dan etnis. Pada kasus Masjid Al-Khairiyah, misalnya, penyuluh agama kemenag tidak dilibatkan untuk membahas solusinya. Ada kesan, kehadiran penyuluh PNS dalam penanganan konflik dipandang tidak urgen dan tidak penting. Mereka dianggap tidak mengetahui menangani konflik. Karena itu, kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tergabung di dalam FKUB dan BKSAUA, dianggap lebih penting untuk penyelesaian kerukunan antarumat beragama di Manado.

Sejauh ini penyuluh agama PNS belum memiliki pengalaman menangani masyarakat yang tengah bertikai. Selama bertahun-tahun menjadi penyuluh, Manado selalu saja aman

dan damai. Kalau pun misalnya terjadi letupan-letupan kecil, itu tidak sampai mengganggu hubungan antarumat beragama di daerah ini. Dan, ketika letupan-letupan tersebut dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, mereka juga belum dilibatkan.

Secara empiris (kontekstual), penyuluh telah berperan aktif dalam membina dan memelihara kerukunan antarumat beragama di Manado. Mereka sering memberikan ceramah mengenai betapa pentingnya kerukunan, toleransi, dan multikultural, sekaligus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, penyuluh bekerja di belakang layar, sehingga luput dari perhatian masyarakat. Mereka tidak seperti tokoh agama, tokoh politik, dan aparat keamanan, yang sering dimuat media ketika menyelesaikan konflik. Memang, soal konflik, itu mungkin dianggap bukan wilayah penyuluh. Itu wilayah tokoh agama dan tokoh masyarakat (BKSAUA dan FKUB), pemerintah, dan aparat keamanan (TNI/Polri). Namun, pada saat bekerja, penyuluh sebenarnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka membina, menceramahi, mengayomi, membentuk karakter keagamaan, dan memberikan suntikan-suntikan moral kepada masyarakat (umumnya lapisan bawah), yang pengetahuan agamanya minim.

Secara kultural, penyuluh dekat dengan masyarakat, dan mengetahui serta memahami karakter masyarakat yang dibina. Sebaliknya, masyarakat juga mempercayai ucapan penyuluh dan bersedia melakukan apa yang disampaikan penyuluh. Bisa dibayangkan, apa jadinya bila penyuluh agama memprovokasi atau mengadu domba masyarakat binaannya? Bila melihat kedekatan penyuluh dengan masyarakat, penyuluh (PNS dan honorer) sebenarnya bisa melahirkan pertikaian, sekaligus juga meredam pertikaian (Wawancara, Kasi Bimas

Kristen Kemenag Kota Manado, Raymond F. Pietersz S, 19 September 2015).

Penyuluh sering pula mengajarkan kerukunan, toleransi, dan multikultural, ketika memberikan kepenyuluhan. Namun, dalam konteks Manado, ceramah dengan mengangkat tema-tema seperti itu dianggap bukan lagi sesuatu yang spesial, karena sudah terbiasa, dan hampir selalu dilakukan setiap kali pertemuan. Pengalaman penyuluh ketika memberikan ceramah di rumah ibadat atau di rumah penduduk adalah, menghindari pemakaian pengeras suara (toa) yang terdengar keluar. Ini dimaksudkan supaya tidak mengganggu orang-orang lain di sekitarnya, yang kebetulan berbeda agama. Penyuluh juga selalu menekankan hidup rukun, bukan hanya dengan sesama pemeluk agama sendiri, melainkan dengan agama lain, serta mengimbau untuk membangun relasi yang baik dengan tetangga seagama dan berbeda agama.

Pada lain kesempatan, penyuluh juga menyampaikan bahaya minuman keras dan bahaya narkoba, yang dapat merusak tubuh, pikiran, masuk penjara, dan bisa melahirkan keributan serta perkelahian. Jadi, ceramah agama yang diajarkan penyuluh tidak melulu kepada ibadah pribadi, yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhan, melainkan juga sudah masuk ke dalam bentuk ibadah sosial, yang berhubungan langsung dengan sosial kemasyarakatan, termasuk relasi dengan agama dan etnis berbeda.

Dikaitkan dengan program kepenyuluhan, penyuluh ternyata belum memasukkan poin-poin tersebut (kerukunan, toleransi, multikultural) ke dalam muatan kurikulumnya. Alasannya, wacana yang dapat memecah belah umat beragama di Manado untuk saat ini dianggap belum begitu penting dan karenanya, belum selayaknya dimasukkan ke dalam kurikulum. Hal ini

didasarkan pula atas pengalaman mereka, yang meskipun terdapat pertikaian dan perseteruan, masalah tersebut selalu dapat diselesaikan tanpa melibatkan penyuluh agama. Alasan kedua, semua Kasi Penyelenggara Kemenag Manado kesulitan mengundang dan mengumpulkan penyuluh dalam satu kegiatan, karena terbentur masalah anggaran. Kepala Seksi Bimas Kristen Kemenag Kota Manado, Raymond, mengemukakan, pihaknya biasa berceramah tentang topik kerukunan di gereja-gereja bukan karena difasilitasi oleh negara (kemenag), melainkan undangan BAMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja). Jadi, pejabat dan penyuluh kemenag kerap kali menghadiri acara yang mereka adakan, lantaran punya hubungan baik dengan BAMAG.

PENUTUP

Situasi kerukunan antarumat beragama di Manado relatif bagus. Manado bahkan sering disebut-sebut ikon kerukunan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga kultural, antara lain, Kementerian Agama, pemerintah daerah (provinsi dan kota), TNI dan Polri, BKSAUA, dan FKUB, yang selalu proaktif merawat, memelihara, serta menyelesaikan setiap kali terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan potensi konflik.

Para penyuluh agama belum mempunyai pengalaman menangani konflik di Manado. Mereka juga belum dilibatkan bila terjadi ketegangan sosial antara umat Islam dan Kristen, seperti kasus pembangunan Gedung Graha Religi dan renovasi Masjid Al-Khairiyah, yang hingga kini (2015) belum tuntas. Hal ini disebabkan, isu kerukunan dalam kepenyuluhan dianggap belum terlalu penting.

Terkait konteks kerukunan umat beragama, penyuluh belum menuangkan ke

dalam program kerja. Mereka hanya menyampaikan pesan-pesan sosial dan moral untuk bisa saling menghormati, menghargai, dan hidup toleransi dengan umat yang berbeda agama. Program kerja penyuluh hanya mengikuti apa yang telah diprogramkan oleh pusat, dan kemudian dikondisikan dengan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M, 1999, *Strategi dan Sinergi Kepenyuluhan Agama*, Intermedia, Jakarta.
- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depag RI, 2003, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya* (tidak diterbitkan).
- Bless, Samuel Asse, 2009, "Pluralisme dan Masa Depan: Perspektif Lokal", dalam *Prospek Pluralisme Agama di Indonesia: Harapan untuk Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan*, editor Herry Mety dan Khairul Anwar, Institut Dian/Interfidei, Yogyakarta.
- BPS Kota Manado, 2014.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2000. *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*.
- Endraswara, Suwardi, 2006a, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Endraswara, Suwardi, 2006, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LkiS, Yogyakarta.
- Moleong J, Lexi, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Putranto, Hendar, 2005, "Analisis Budaya dari Pascamodernisme dan Pasca modernitas",

- dalam *Teori-Teori Kebudayaan*, Editor Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, LkiS, Yogyakarta.
- Pengertian dan Hakikat Penyuluh Agama, dalam (<https://ngariungbabarengan.wordpress.com/penyuluhan/pengertian-dan-hakikat-penyuluh-agama/>, diakses 14 Desember 2015).
- Rakor Bersama Polda, Sepakat Pembangunan di Lahan Eks Kampung Texas Dipping*, dalam <http://manadoline.com/icon-torang-samua-basudara-segera-hadir-di-manado/>, diakses 6 Oktober 2015.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor: 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar, 2010, *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam di Kawasan Timur Indonesia*, Balai Litbang Agama, Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2011. *Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado*, Balai Litbang Agama, Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar, 2011, *Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Muallaf di Kawasan Timur Indonesia*, Balai Litbang Agama, Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar, 2012, *Dakwah Keagamaan di Daerah Terpencil*, Balai Litbang Agama, Makassar.